



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Waspadai Siasat Menunda Rapat Paripurna
Tanggal	: Jumat, 23 Agustus 2024
Surat Kabar	: Pikiran Rakyat
Halaman	: 1&10

## Waspadai Siasat Menunda Rapat Paripurna

JAKARTA, (PR) -

Buntut dari aksi demonstrasi massa yang meluas dan rusuh, DPR meminta izin pada pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang (RUU) Pilkada tersebut dilaksanakan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun akan diberlakukan untuk Pilkada 2024. Namun, publik justru mewanti-wanti agar tidak terjadi siasat DPR yang menunda-nunda pelaksanaan Pilkada adalah keputusan JR (*Judicial review*) MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,"

kata Daseo dalam akun resmi media sosial X yang diunggah pada Kamis (22/8/2024) petang.

Ruji Pilkada dilanjutkan pro dan kontra kamis dimulai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8/2024) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya, pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan putusan MK pada Selasa (20/8/2024) lalu, yang sifatnya perlu dilanjutkan. Sebaliknya, pada hari kemarin, jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum setelah hanya dihadiri oleh 86 dari total 575 anggota

DPR RI.

Sufni Daseo Ahmad menjamin, tidak akan ada agenda pengesahan Keputusan DPR RI pada sidang Pilkada secara di luar-dalam, sedangkan batas disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis pagi. Dia mengatakan bahwa sesuai dengan aturan tata tertib, rapat paripurna hanya bisa digelar pada hari Selasa atau Kamis. Demikian pun, tidak ada pengesahan RUU Pilkada hingga dilantiknya daftar calon kepala daerah dalam pilkada pada 27 Agustus 2024.

"Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila ada paripurna lagi, harus mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai dengan tata tertib di DPR," katanya.

Dasco saat konferensi pers di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta,

sekarang malam.

Menurut Daseo, rapat-rapat yang digelar di DPR itu bersifat terbuka dan diundang seluruh anggota DPR. Karena itu, siasat DPR. Begitu pun dengan rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang membahas RUU Pilkada, Rabu (21/8/2024), pun berlaku dan bisa disaksikan masyarakat.

Karena RUU Pilkada yang diundang masyarakat tidak ada yang berlaku adalah hasil perjanjian Mahkamah Konstitusi, *judicial review* yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora," kata dia.

Sifni berdahulu bahwa RUU Pilkada, pasalnya, proses legislatif terhadap RUU tersebut sudah dilakukan

(Bersambung ke hal. 1 kol. 1)

### Waspadai Siasat

(Sambungan dari hal. 1 kol. 5)

sejak Januari 2024, tetapi sejauh ini belum selesai.

Walau pun begitu, dia mengatakan bahwa RUU Pilkada akan tetap di laksanakan pada 27 Agustus 2024, yakni pada hari ketiga pelantikan Pilkada 2024 selesa. Soalnya, DPR pun memiliki bahwa mekanisme dalam proses pilkada atau pemilu perlu disegelintir.

#### Segelintir elite

Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Samapow, mengatakan, penundaan rapat paripurna DPR me-

nunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPR memang tak setuju dengan keputusan Baleg, lalu untuk melakukannya mereka juga perlu mendapatkan suara. Para anggota DPR tetap diperintahkan, oleh pimpinan partai koalisi kartel untuk tetap berada di sekitar kantor DPR agar bisa sejawat dengan para pemimpin partai lainnya untuk menghalangi paripurna. Makanya tetap harus dikalau dan diwaspadai," tuturnya.

Menurut Jerry, jika DPR tetap memaksakan rapat

paripurna, risikonya terlalu besar. "Kebutuhan politik dan bergerak Golongan protes akan makin masif terjadi dan bisa berujung kepada kecauan."

"Sebab golongan protes ini merupakan perlawanan bagi para pemimpin partai yang berdiri, para anggota DPR tetap diperintahkan, oleh pimpinan partai koalisi kartel untuk tetap berada di sekitar kantor DPR agar bisa sejawat dengan para pemimpin partai lainnya untuk menghalangi paripurna. Makanya tetap harus dikalau dan diwaspadai," tuturnya.

Menurut Jerry, jika DPR tetap memaksakan rapat

paripurna, risikonya terlalu besar. "Kebutuhan politik dan bergerak Golongan protes akan makin masif terjadi dan bisa berujung kepada kecauan."

"Sebab golongan protes ini merupakan perlawanan bagi para pemimpin partai yang berdiri, para anggota DPR tetap diperintahkan, oleh pimpinan partai koalisi kartel untuk tetap berada di sekitar kantor DPR agar bisa sejawat dengan para pemimpin partai lainnya untuk menghalangi paripurna. Makanya tetap harus dikalau dan diwaspadai," tuturnya.

Menurut Jerry, jika DPR tetap memaksakan rapat

Kantor Komunikasi Komisi Penyelenggara Pemilihan Presiden (KPP) menyatakan, pemerintah mengikuti aturan yang berlaku terkait RUU Pilkada. Apalagi, DPR RI sudah mendeklarasikan diri sebagai partai berdaulat, para anggota positif, tpi menjujung, yang dimainkan DPR, elite partai, dan pemerintahan Jokowi," katanya.

Jerry mengatakan, situasi ini jadi tantangan bagi DPR untuk memaksakan terpilih dan bisa berjalan dengan baik. "Kita harus berusaha untuk menghindari hal itu."

"Pemerintah dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah tetap akan mengikuti aturan yang berlaku," katanya.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Jerry mengatakan, tindakan Baleg DPR sudah dapat prosedur dan acara substansi karenanya dilakukan terburu-buru, memadak dan tak mengikuti proses yang berlaku. Lantaran Baleg DPR tidak mencantumkan perihal dasar-dasar demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan naik minatnya pada jalannya proses demokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan peranannya di ranah yudikatif. DPR menjalankannya di ranah legislatif. "Jadi, sebenarnya substansi dan maknanya rapat paripurna yang hadir juga memperlakukan peran sebagai aktor demokrasi."

Sementara itu, Kepala

dan perbedaan pendapat, kita sebaiknya kebersama kita sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Pemerintah berharap tidak adanya disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan.

"Kita harus tetap berpegang pada posisi kita dan tetap solid," kata Hansen.

Hansen menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR tetap wajib putuskan aturan yang berlaku.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hansen memandang proses demokrasi tamp